



Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 028/Kep.252-BPKD/2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR: 028/Kep.767-BPKD/2017 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA BARANG,
PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS
BARANG PENGGUNA PADA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018**

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas/mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 821.2/Kep.1081-BKPPD/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, maka Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna yang semula telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 028/Kep.767-BPKD/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perdagangan yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 028/Kep.95B-BPKD/2018 tanggal 23 Februari 2018 maka perlu ditinjau dan dilakukan perubahan kembali.
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perubahannya tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 50);
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 81);
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 55);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 61).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: 028/Kep.767-BPKD/2017 tentang Penunjukan Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan

Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas
Perdagangan Kabupaten Bekasi Tahun 2018.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah
merubah ketentuan Lampiran nama Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang, yang semula :

No	Nama	Jabatan Dalam SKPD	Ditunjuk Sebagai
1	2	3	4
1	Drs. H. IDA NURYADI, SE, M.Si NIP. 19671103 200311 1 001	SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG

diubah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Dalam SKPD	Ditunjuk Sebagai
1	2	3	4
1	Dra. WAWAT WATINIH, MM NIP. 19671008 199303 2 003	SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG

KETIGA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Keputusan Bupati Nomor: 028/Kep.95B-BPKD/2018 tentang
Penunjukan Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna
Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan
sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal : 23 Juli 2018

 BUPATI BEKASI

 dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
2. Inspektur Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bekasi;
4. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi.